

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Salemba Humanika
- Albrow, Martin. 1996. *Birokrasi*. Terjemahan. M. Rusli Karim. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Beetham, David. 1990. *Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dilatur, "Geografi Desa dan Pengertian Desa", *Forum Geografi*. No.14 dan 15 th. VIII, Juli dan Desember 1994, 125.
- Dunn, William N, 2000. *Publiv Policy Analysis: An Indtroduction Second Edition*. Yogyakarta. Gadjaja Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herabudin. 2016. *Studi kebijakan Pemerintah (Daro Filosofi ke Implementasi)*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Heady. 1966. *Birokrasi Pelayanan Publik*. Vol. 13.
- Knott, Jack H. & Gary J.M. 1998. *Reforming Bureaucracy: The Politics of Institutional Choice*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Mansur, Jumria. 2021. *Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik*. *Jurnal Ekonomi Islam*.

Mulyadi , Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Mustafa, Delly. (2003). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: CV. Alfabetta

Mustopadidjaja, AR. (1985). *Perkembangan dan Penerapan Studi Kebijaksanaan Dilihat Dalam Kaitan Disiplin dan Sistem Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Neny Tri, “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, *Assets*. Vlo. 1. No.2, Juli 2017, 32.

Smith, BC.1985.*Decentralization, The Territorial Dimension of The State*, London : George Allen an Unwin.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 13.

Thoha, Mifta. 1987. *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance – Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Zauhar. 1996. *Pola Dasar sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT Ina Publikatama.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang- Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , UU No. 5 Tahun 1960, LN No . 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No 24 Tahun 1997, LN, No 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa, Nomor 6 Tahun 2014 , Pasal 19.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2022.

“Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022.” *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* 1–148.